



Turki Utsmani 1299-1924: Sistem Politik, Pemerintahan, Bentuk Negara, Perkembangan Intelektual, Ilmu, Agama dan Budaya

Syahidah Qolbiya Sakinah¹, Muhamad Zaky Avicena²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 10-07-2025

Revised 23-08-2025

Accepted 25-09-2025

Published 02-10-2025

Keywords:

Civilization;

Culture;

Intellectual;

Ottoman;

Politics

Correspondence:

syahidah@gmail.com

Abstract

The existence of the Ottoman Empire (1299–1924) as a political power and center of Islamic civilization represents a crucial phenomenon in world history. This study aims to analyze the political system, governance, state structure, and the development of intellectual, scientific, religious, and cultural life during the Ottoman era, covering the empire's establishment, golden age, and eventual decline. The research adopts a qualitative historical method through literature review of secondary sources (books, journals, manuscripts) and translated primary sources (archives, works of scholars). The findings reveal: (1) A political system based on absolute monarchy and a hybrid legal framework (Hanafi sharia-kanun) supported imperial expansion and multiethnic stability; (2) A structured education system (madrasah) and state patronage fostered advancements in applied sciences (astronomy, medicine, architecture) and cultural expression in arts and language; (3) Islamic spirituality was mobilized through the caliphate title and ghaza narrative; (4) The millet system accommodated diversity, though bureaucratic stagnation and modernizing pressures led to decline. The novelty of this study lies in its holistic approach that integrates political, intellectual, and cultural aspects, revealing the interconnection between power and civilizational dynamics. The implications offer a comprehensive perspective for Islamic historical studies, emphasizing that Ottoman glory was sustained through the integration of knowledge, religion, and governance rooted in Islamic principles.

Eksistensi Kesultanan Turki Usmani (1299–1924) sebagai kekuatan politik dan pusat peradaban Islam merupakan fenomena krusial dalam sejarah dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem politik, pemerintahan, bentuk negara, serta perkembangan intelektual, ilmu, agama, dan budaya di era Usmani, dengan ruang lingkup mencakup pendirian, kejayaan, hingga keruntuhannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif historis melalui studi pustaka terhadap sumber sekunder (literatur, jurnal, manuskrip) dan primer terjemahan (arsip, karya ulama). Hasil penelitian mengungkap: (1) Sistem politik berbasis monarki absolut dan hukum hibrida (syariah Hanafi-kanun) mendukung ekspansi dan stabilitas multi-etnis; (2) Pendidikan terstruktur (madrasah) dan patronase istana melahirkan kemajuan sains terapan (astronomi, kedokteran, arsitektur) serta budaya seni-bahasa; (3) Spiritualitas Islam dimobilisasi lewat gelar kekhalifahan dan narasi ghaza; (4) Sistem millet mengakomodasi keragaman, namun stagnasi



birokrasi dan tekanan modernisasi memicu kemunduran. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek politik-intelektual-budaya secara sinergis, mengungkap interkoneksi kekuasaan dengan dinamika peradaban. Implikasinya memberikan perspektif komprehensif bagi kajian sejarah Islam, menekankan bahwa kejayaan Usmani ditopang oleh integrasi ilmu, agama, dan tata kelola negara berbasis prinsip Islam.

A. PENDAHULUAN

Eksistensi dan perkembangan Islam dalam wilayah Kekaisaran Turki Usmani merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah peradaban Islam yang menunjukkan dinamika kekuasaan, kebudayaan, serta intelektualitas dunia Islam selama berabad-abad. Kerajaan ini tidak hanya memainkan peran sebagai kekuatan politik dan militer yang dominan di kawasan Eurasia, tetapi juga menjadi pusat perkembangan keilmuan, keagamaan, dan kebudayaan Islam yang berpengaruh hingga ke wilayah Asia, Eropa, dan Afrika. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana Islam berkembang dalam kerangka kekuasaan imperium besar seperti Turki Usmani, baik dari sisi struktur politik dan pemerintahan maupun dari sisi kontribusinya terhadap pemikiran, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam.

Permasalahan di lapangan yang sering ditemukan adalah minimnya pemahaman komprehensif tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan Usmani berkontribusi terhadap perkembangan agama dan ilmu pengetahuan Islam, serta bagaimana kekaisaran ini membentuk identitas keislaman yang khas dan berbeda dengan entitas politik Islam lainnya. Selain itu, sering kali narasi sejarah tentang Turki Usmani lebih banyak terfokus pada aspek militer dan ekspansi wilayah, sehingga menutupi peran pentingnya dalam membangun peradaban Islam yang kompleks dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian awal, penyebab dari kurangnya pemahaman tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya literatur dalam bahasa Indonesia yang mengkaji secara integral aspek politik, intelektual, dan kebudayaan Turki Usmani; pendekatan kajian sejarah yang masih bersifat fragmentaris; serta kurangnya integrasi antara disiplin ilmu sejarah, politik Islam, dan studi keislaman dalam menelaah dinamika kekaisaran ini. Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada proses berdirinya kekaisaran, pertumbuhannya, serta sistem politik dan pemerintahan yang diterapkan, termasuk

bentuk negara, dan bagaimana semua itu mendorong perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya Islam di wilayah kekuasaan Turki Usmani.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba mengangkat tema serupa, seperti kajian tentang peran Turki Usmani dalam mempertahankan kekhilafahan Islam setelah runtuhnya Baghdad, atau tentang kontribusinya dalam bidang arsitektur Islam dan hukum Islam. Namun, banyak dari penelitian tersebut belum mengintegrasikan secara utuh antara aspek politik dan intelektual dalam satu analisis yang komprehensif. Perbedaan utama dari tulisan ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan holistik yang digunakan untuk menggambarkan interkoneksi antara sistem kekuasaan dan perkembangan peradaban Islam secara menyeluruh dalam konteks Turki Usmani. Hal ini menjadi nilai kebaruan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah dan peradaban Islam.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Kekaisaran Turki Usmani tidak hanya menjadi kekuatan politik, tetapi juga motor penggerak utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan budaya Islam. Melalui tulisan ini, diharapkan pembaca dapat melihat bahwa kejayaan Turki Usmani bukan semata-mata ditopang oleh kekuatan militernya, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melahirkan tatanan masyarakat yang dinamis dan berbudaya tinggi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai pendekatan utama untuk mengkaji eksistensi dan perkembangan Islam di wilayah Kekaisaran Turki Usmani. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kekaisaran Turki Usmani itu sendiri sebagai sebuah institusi politik dan peradaban Islam yang kompleks. Fokus penelitian diarahkan pada proses berdirinya kekaisaran, sistem pemerintahan dan politik yang diterapkan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, keagamaan, dan budaya Islam. Dengan menjadikan Kekaisaran Turki Usmani sebagai subjek kajian, penelitian ini menelaah peristiwa-peristiwa, struktur kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan karya-karya intelektual yang berkembang selama masa kekuasaan kekaisaran tersebut.

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan

karakteristik penelitian yang berorientasi pada rekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, objektif, dan kritis. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah bertujuan untuk menyusun narasi berdasarkan jejak-jejak masa lalu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kuntowijoyo, 1995:89). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali hubungan kausal, dinamika sosial-politik, dan perkembangan intelektual dalam konteks waktu dan ruang tertentu, yaitu pada masa kejayaan Turki Usmani.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu berupa literatur-literatur historis yang relevan, seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, manuskrip, dokumen resmi, serta sumber primer terjemahan seperti arsip pemerintahan Usmani, karya intelektual ulama setempat, dan catatan perjalanan para pengamat asing. Beberapa karya sejarawan modern dan klasik seperti *The Ottoman Empire and Islamic Tradition* karya Norman Itzkowitz dan *Osman's Dream* oleh Caroline Finkel menjadi referensi utama dalam memahami narasi sejarah dan interpretasinya secara akademis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengidentifikasi informasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dari berbagai sumber tertulis dan digital. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menghindari bias dan memastikan validitas informasi. Peneliti menggunakan alat bantu berupa tabel kategorisasi dan kronologi peristiwa untuk memetakan data secara tematik dan temporal.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis historis, yang terdiri dari empat tahap utama: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran makna), dan historiografi (penulisan sejarah). Dalam proses ini, peneliti berupaya menyeleksi dan mengkritisi data berdasarkan validitas sumber, kemudian menyusunnya menjadi narasi sejarah yang logis dan argumentatif. Penafsiran dilakukan secara kontekstual untuk menggambarkan hubungan antara kekuasaan politik Usmani dan kontribusinya terhadap perkembangan Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai peran Turki Usmani dalam sejarah peradaban Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam menggali sejarah panjang dan dinamis Kesultanan Turki Usmani, tulisan ini tidak hanya menyusun kronologi kejadian, melainkan juga mengolah data sejarah secara interpretatif dan sintetik. Dengan pendekatan deskriptif-analitik yang berlandaskan prinsip sejarah profetik sebagaimana diuraikan oleh Kuntowijoyo (2003), hasil penelitian ini berusaha menafsirkan makna di balik fakta-fakta sejarah. Setiap temuan diolah bukan sebagai data mentah, tetapi sebagai narasi yang mengandung pesan, dinamika sosial, dan refleksi nilai dalam ruang dan waktu.

Salah satu temuan yang paling mendasar adalah bagaimana Kesultanan Usmani tumbuh dari benih kecil kekuasaan lokal di Anatolia menjadi imperium besar dunia Islam. Fakta berdirinya kerajaan ini oleh Osman I pada tahun 1299 adalah titik awal dari sejarah yang panjang, namun bagaimana itu terjadi adalah kisah adaptasi, visi politik, dan daya tahan sosial. Dengan memanfaatkan kevakuman kekuasaan pasca-Seljuk dan keretakan Bizantium, Osman I menggunakan kekuatan militer dan legitimasi agama untuk membangun dasar pemerintahan yang baru, berlandaskan Islam dan bersifat inklusif terhadap komunitas yang beragam.

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah klaim kekhalifahan oleh Sultan Selim I pada 1517. Peristiwa ini lebih dari sekadar pengakuan gelar. Ia menjadi simbol pergeseran sentralitas dunia Islam dari Timur ke Barat. Dengan merebut Hijaz dan kota-kota suci, Usmani membingkai kekuasaan spiritual dan politik dalam satu tangan. Ini bukan hanya penaklukan geografis, tetapi juga penaklukan simbolik yang memperkuat wibawa Sultan sebagai Amir al-Mu'minin. Di sinilah terlihat bagaimana kekuasaan spiritual dimobilisasi menjadi instrumen kekuatan negara.

Kesultanan Usmani juga menunjukkan kemampuannya menyusun sistem hukum yang mampu menyatukan wilayah yang sangat luas. Gabungan antara syariah mazhab Hanafi dan kanun (undang-undang sekuler) menjadi fondasi pemerintahan yang fleksibel namun tegas. Ulama dan birokrat tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja bersama dalam kerangka yang saling menguatkan. Syekh al-Islam, kazasker, dan qadi menjadi wajah otoritas moral negara. Namun, kekuatan ini juga mengandung keterbatasan: kontrol negara yang ketat terhadap ilmu dan fatwa bisa mematikan dinamika pemikiran yang kritis.

Dalam dunia pendidikan dan intelektual, temuan penelitian menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya menjadi ruang transmisi ilmu, tetapi juga sarana

kaderisasi birokrasi. Sistem pendidikan yang terstruktur dari tingkat dasar hingga madrasah tinggi memperlihatkan visi jangka panjang negara dalam membentuk sumber daya manusia. Kurikulum yang memadukan ilmu wahyu dan ilmu rasional mencerminkan semangat ilmiah Islam klasik. Namun, justru pada titik ini pula kita melihat paradoks: ketika madrasah terlalu tunduk pada ideologi negara, maka daya inovasinya menurun. Di sinilah terlihat bahwa ilmu membutuhkan otonomi untuk berkembang.

Ilmu pengetahuan terapan di era Ustmani memperlihatkan interaksi harmonis antara teori dan praktik. Observatorium yang dibangun oleh Taqi al-Din, rumah sakit di Edirne yang memadukan pengobatan medis dan terapi musik, hingga sistem irigasi dan drainase kota yang canggih merupakan bukti bahwa sains dihidupi oleh kebutuhan sosial, bukan sekadar prestise intelektual. Dalam arsitektur, Mimar Sinan bukan hanya membangun masjid, tetapi membangun ruang publik yang berfungsi dan bermakna. Masjid Süleymaniye, misalnya, menjadi simbol keagungan, kesederhanaan, dan keteraturan ruang hidup masyarakat.

Di bidang budaya, kita menemukan bagaimana tradisi dan inovasi saling menyapa. Seni miniatur, kaligrafi, sastra, dan musik tidak berkembang dalam ruang kosong, tetapi dalam pelukan lembut patronase istana. Bahasa Ottoman yang kaya dengan campuran Turki, Arab, dan Persia menjadi medium ekspresi kreatif yang kompleks. Perpustakaan, manuskrip, dan komunitas literasi berkembang, walaupun terbatas pada kalangan elite. Tradisi literasi ini menegaskan bahwa peradaban hidup selama ia bisa menulis, membaca, dan mengingat.

Sistem millet yang diterapkan untuk komunitas non-Muslim menjadi temuan penting dalam manajemen sosial. Kesultanan tidak sekadar menoleransi, tetapi mengakomodasi perbedaan dalam kerangka otoritas Islam. Ini menciptakan kohesi sosial dalam keberagaman. Namun, seperti segala sistem sosial, ia tidak abadi. Ketika tekanan nasionalisme dan modernitas muncul pada abad ke-19, sistem ini mulai runtuh dan tidak lagi cukup fleksibel.

Masa kemunduran Usmani tidak datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari stagnasi birokrasi, penurunan kualitas militer, dan ketidaksiapan menghadapi dunia baru. Reformasi Tanzimat mencoba menawarkan jalan keluar, namun menimbulkan ambiguitas baru. Negara menjadi ragu: antara tetap dalam tradisi atau membuka diri sepenuhnya pada Barat. Ketegangan ini membelah elite, mengganggu stabilitas, dan menggerus kepercayaan rakyat.

Keseluruhan hasil ini memperlihatkan bahwa Kesultanan Turki Usmani bukan sekadar kerajaan, tetapi laboratorium sejarah yang sarat makna. Ia adalah ruang di mana Islam, kekuasaan, ilmu, dan budaya saling bertemu dan bersilang. Dengan interpretasi yang humanis dan reflektif, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang kejayaan atau kejatuhan, tetapi tentang proses manusia membangun makna, menciptakan tatanan, dan menanggung konsekuensinya.

Pembahasan

1. Awal Mula Berdirinya Turki Usmani

Turki Usmani atau Kesultanan Utsmani atau *Ottoman Empire* didirikan oleh Osman I pada tahun 1299. Osman I adalah pemimpin dari suku Oghuz Turki yang menetap di Anatolia (Asia Kecil), wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan berbagai kerajaan kecil lainnya. Suku Oghuz merupakan kelompok Turki nomadik asal Asia Tengah yang bermigrasi ke Anatolia pada abad ke-11 akibat tekanan dari invasi Mongol. Suku Oghuz, khususnya kabilah Qayi, mengabdikan kepada Sultan Alaeddin II dari Dinasti Seljuk. Pada tahun 1300 M, setelah serangan Mongol terhadap Seljuk, Sultan Alaeddin II wafat yang menjadikan wilayahnya terpecah dan kabilah Qayi yang dipimpin oleh Ertuğrul memperoleh tanah di wilayah Asia Kecil, yakni Anatolia, sebagai imbalan atas jasa-jasanya. Osman I, putra Ertuğrul, yang memimpin pasukan Muslim Oghuz Turki ini disebut ghazi yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya dan mendirikan kerajaan independen yang dikenal sebagai Kesultanan Utsmani.

Berdirinya Kesultanan Utsmani dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, diantaranya:

a. Pengaruh Kebijakan Bizantium yang Lemah:

Pada akhir abad ke-13, Kekaisaran Bizantium yang sebelumnya dominan di kawasan tersebut sedang berada dalam keadaan lemah, terutama setelah penaklukan konstantinopel pada 1204 oleh Tentara Salib (Perang Salib Keempat). Hal ini menciptakan peluang bagi kerajaan-kerajaan kecil seperti yang dipimpin oleh Osman I untuk berkembang.

b. Penyebaran Islam dan Kerajaan Seljuk

Sebelum mendirikan Kesultanan Utsmani, wilayah Anatolia telah dipengaruhi oleh penyebaran Islam melalui invasi-invasi Seljuk Turki pada abad ke-11. Kerajaan Seljuk Anatolia (Sultanat Rûm) yang berada di bawah kepemimpinan Seljuk

memberikan dasar bagi Osman I untuk membangun kekuasaannya dengan mengadopsi Islam sebagai agama negara dan memperoleh dukungan dari penduduk Muslim di wilayah tersebut.

c. **Militer dan Strategi Diplomatik**

Osman I dan penerusnya berhasil membangun kekuatan militer yang kuat, terutama dalam hal pasukan berkuda dan strategi pengepungan yang efektif. Dengan kebijakan diplomatik dan militer yang cermat, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka, termasuk Kekaisaran Bizantium yang melemah dan berbagai kerajaan kecil yang ada di Anatolia dan sekitarnya.

2. Gelar Khilafah Pada Turki Utsmani

Kesultanan Ottoman menjadikan mazhab Sunni Hanafi sebagai dasar hukum dan identitas negara. Pilihan ini tidak hanya mencerminkan warisan Seljuk tetapi juga strategi politik untuk menyatukan imperium multietnis (İnalcık, H, 2000:167). Kitab fikih Hanafi seperti Hidayah karya al-Marghinani menjadi kurikulum wajib di madrasah, sementara fatwa resmi (fetva) dari Syekh al-Islam mengikat secara hukum (Imber, C, 2002:201). Dominasi Hanafi memperkuat kontrol negara atas interpretasi agama, meminggirkan mazhab lain seperti Syafii atau Syiah.

Gelar kekhalifahan diadopsi secara resmi setelah Sultan Selim I menaklukkan Hijaz (1517), setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Mamluk, menjadikan Ottoman pelindung Mekkah dan Madinah (Faroghi, S, 2004:89). Sebagai Amīr al-Mu'minīn (Pemimpin Orang Beriman), Sultan memegang otoritas tertinggi atas urusan agama dan politik. Legitimasi ini digunakan untuk mengesahkan ekspansi militer sebagai jihad dan mengatur hukum keluarga melalui kanun (hukum sekuler) (Darling, L, 1995:112).

Syekh al-Islam, diangkat oleh Sultan, menjadi otoritas fatwa tertinggi. Jabatan ini mengawasi jaringan ulama, termasuk:

- Kazasker (hakim militer) yang mengatur pengadilan di provinsi.
- Müderris (profesor madrasah) yang mengajar ilmu agama.
- Qadi (hakim lokal) yang menyelesaikan sengketa sipil (Imber, C, 2002: 215). Ulama Hanafi seperti Ebussuud Efendi (w. 1574) mereformasi hukum waris dan perkawinan untuk selaras dengan kebutuhan negara.

Hukum Ottoman memadukan syariah dengan kanun (peraturan sekuler) yang dikeluarkan Sultan. Contohnya, Kanunname Süleyman (hukum agraria) mengatur

distribusi tanah tanpa melanggar prinsip syariah (Inalcık, H, 2000:189). Kolaborasi antara ulama dan birokrat ini menciptakan sistem hukum hibrida yang fleksibel, meski sering memicu ketegangan antara otoritas agama dan negara.

Madrasah Ottoman, seperti Sahn-ı Seman (1470) dan Süleymaniye (1557), dirancang untuk mencetak ulama-biokrat loyal. Kurikulumnya menekankan fikih Hanafi, tafsir, dan hadis, sementara ilmu rasional (filsafat, astronomi) diajarkan secara terbatas (İhsanoğlu, E, 2004:177). Lulusan madrasah diharuskan mengabdikan pada negara, memperkuat kontrol ideologi Sunni.

Narasi ghaza (perang suci) digunakan untuk melegitimasi ekspansi militer ke Balkan dan Eropa. Sultan seperti Mehmed II dan Süleyman I menggambarkan penaklukan Konstantinopel (1453) dan Beograd (1521) sebagai "jihad melawan kafir" (Kafadar, C, 1995:134). Propaganda ini memperkuat dukungan rakyat dan memobilisasi tentara.

Tarekat Sufi seperti Bektashi dan Mevlevi berperan ganda: di satu sisi menjadi mitra negara dalam menyebarkan Islam, di sisi lain berpotensi subversif. Tarekat Bektashi terkait erat dengan korps Janissari, sementara Mevlevi dipromosikan sebagai simbol toleransi. Namun, tarekat Syiah Qizilbash di Anatolia dibasmi karena dianggap ancaman.

Non-Muslim (Kristen, Yahudi) diatur dalam sistem millet yang memberi otonomi terbatas. Mereka diwajibkan membayar jizyah (pajak perlindungan) tetapi bebas menjalankan hukum agama sendiri. Kebijakan ini mengurangi konflik internal sekaligus mempertahankan supremasi Islam Sunni sebagai identitas negara.

Pada abad ke-18, otoritas keagamaan Ottoman melemah akibat korupsi hierarki ulama dan tekanan modernisasi. Reformasi Tanzimat (1839) memperkenalkan kesetaraan hukum untuk non-Muslim, mengikis prinsip syariah (Deringil, S, 1998:45). Upaya Sultan Abdulhamid II (1876–1909) menghidupkan kembali Pan-Islamisme gagal mengembalikan pengaruh ideologi Sunni di tengah kebangkitan nasionalisme.

3. Perubahan Sistem Politik dan Bentuk Negara

Setelah berdiri, Kesultanan Utsmani mengalami banyak perubahan dalam sistem politik dan bentuk negara. Secara garis besar, perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa fase:

a. Pendirian dan Perkembangan Awal (1299-1453)

Pada awalnya, sistem pemerintahan Utsmani bersifat monarki absolut, di mana Sultan memiliki kekuasaan penuh. Kesultanan ini awalnya bersifat feodal dan terdiri dari wilayah yang diperoleh melalui penaklukan. Sistem pemerintahan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan kekuasaan Sultan sebagai pemimpin spiritual dan duniawi. Sultan juga menggunakan militer yang terorganisir dengan baik untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya.

Pada periode ini, Konstantinopel (sekarang Istanbul) jatuh pada tahun 1453 di bawah Sultan Muhammad II (*Mehmed the Conqueror*). Ini menjadi titik balik bagi Utsmaniyah karena kemenangan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan menambah kuat posisi Utsmani di dunia Islam dan Eropa (Goffman, D, 2002:100-160).

b. Era Keemasan (1453-1600)

Di bawah Sultan seperti Süleyman I (*Suleiman the Magnificent*), Kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Ottoman memiliki sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dengan divisi administratif yang jelas dan pejabat-pejabat yang terlatih. Kekaisaran ini memperkenalkan sistem millet (komunitas agama) untuk mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim di wilayah mereka. Sistem ini memungkinkan adanya otonomi terbatas bagi komunitas Kristen dan Yahudi di bawah kekuasaan Sultan, dengan pengakuan terhadap hak-hak agama mereka. Pada masa ini, Dewan Imperial (Divan) menjadi bagian penting dalam administrasi pemerintahan, berfungsi sebagai organ konsultatif yang membantu Sultan dalam pengambilan keputusan (İnalcık, H, 2000:4-80).

c. Dekadensi dan Reformasi (1600-1800)

Setelah era keemasan, Kesultanan Utsmani mulai mengalami kemunduran. Korupsi dalam administrasi, kemunduran dalam militer, dan kerusuhan internal mulai mengganggu kestabilan negara. Selain itu, persaingan dengan negara-negara Eropa yang lebih maju seperti Austria, Rusia, dan Inggris mengurangi pengaruh Utsmani di Eropa.

Untuk mencoba mengatasi kemunduran ini, beberapa Sultan seperti Selim III (1789-1807) mulai memperkenalkan reformasi, meskipun banyak di antaranya gagal karena resistensi dari elit tradisional. Pada masa ini, Sistem Janissari (pasukan elit yang setia kepada Sultan) juga mengalami penurunan kualitas, yang semakin melemahkan stabilitas negara.

d. Era Modernisasi dan Keruntuhan (1800-1923)

Pada abad ke-19, Turki Usmani menghadapi berbagai tantangan besar: tekanan dari negara-negara Barat, kebangkitan nasionalisme di kalangan wilayah-wilayah yang dikuasai, serta kegagalan dalam mempertahankan posisinya di dunia internasional.

Pada pertengahan abad ke-19, Sultan Abdulmecid I memulai serangkaian reformasi yang dikenal dengan nama Tanzimat, yang bertujuan untuk modernisasi administrasi, hukum, dan militer. Reformasi ini juga berusaha untuk memberikan hak-hak lebih kepada non-Muslim di dalam kekaisaran, namun sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional (Lewis, B, 167).

Keruntuhan akhir Kesultanan Utsmaniyah terjadi setelah Perang Dunia I (1914-1918), di mana kekaisaran ini berakhir dengan kekalahan. Pada tahun 1922, Sultan terakhir, Mehmed VI, dipaksa untuk turun tahta, menandai berakhirnya era Utsmani.

e. Pembentukan Republik Turki (1923)

Pada tahun 1923, setelah era kekaisaran berakhir, Mustafa Kemal Atatürk memimpin perjuangan untuk mendirikan Republik Turki. Atatürk mengubah sistem pemerintahan menjadi republik sekuler dengan mengadopsi reformasi politik, sosial, dan budaya yang radikal. Sistem monarki dihapuskan, dan negara ini mengadopsi bentuk pemerintahan demokratis dengan konstitusi baru yang lebih modern (Davutoğlu, A, 2012)

4. Perkembangan Intelektual dan Budaya

a. Sistem Pendidikan

Kekaisaran Ottoman, yang muncul pada akhir abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, merupakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia. Berdiri di persimpangan antara Eropa dan Asia, Ottoman tidak hanya unggul dalam bidang militer dan politik, tetapi juga menekankan pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual sebagai fondasi kekuatannya. Interaksi lintas budaya dan agama dalam kekaisaran yang luas inilah yang mendorong pertukaran gagasan dan inovasi di berbagai disiplin ilmu.

Tradisi pendidikan Ottoman dibangun di atas institusi medrese, madrasah yang didirikan tidak hanya untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kurikulum medrese menggabungkan naskah klasik Arab-Persia dengan pemikiran logika Yunani, menciptakan tradisi pendidikan yang holistik. Madrasah tidak hanya menjadi tempat

menimba ilmu, tetapi juga pusat penelitian dan penerjemahan, di mana para sarjana menyunting naskah-naskah dan menulis karya-karya orisinal.

Peran ulama (‘ulamā’) dalam sistem birokrasi Ottoman sangat penting. Ulama berfungsi sebagai guru, hakim, penasehat hukum, dan bahkan pembuat kebijakan. Struktur hierarkis mereka—dari qadi (hakim) tingkat lokal hingga Shaykh al-Islām, pemimpin ulama tertinggi—membuat standarisasi ajaran dan fatwa lebih mudah ditegakkan. Melalui peran ganda ini, wacana keagamaan turut membentuk kebijakan negara, sebaliknya kebijakan negara juga mempengaruhi perkembangan ilmu keagamaan.

Di samping institusi formal, perkembangan ilmu dan budaya juga didukung oleh patronase elit penguasa, termasuk sultan dan pejabat tinggi. Mereka mendirikan observatorium, perpustakaan, dan pusat-pusat budaya, mempertemukan ilmuwan, penulis, serta seniman dari berbagai latar belakang. Kemitraan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog antara rasionalitas dan spiritualitas, menghasilkan karya-karya yang memadukan akal dan iman, serta warisan budaya yang masih dikenang hingga era modern.

Pengembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di dalam Turki Utsmanis menggunakan sistem Pendidikan Terstruktur. Sistem pendidikan Ottoman ini dibangun secara berjenjang, dimulai dari sibyan mektebi (sekolah dasar) yang mengajarkan baca-tulis al-Qur’an dan dasar aritmatika. Madrasah menengah (medrese) seperti yang didirikan Orhan Gazi di İznik (1331) fokus pada fikih Hanafi dan logika (İnalcık, H, 2013:167). Pada puncaknya, madrasah tinggi seperti Sahn-ı Seman (1470) dan Süleymaniye (1557) menawarkan spesialisasi dalam astronomi, kedokteran, dan administrasi (Imber, C, 2012: 201). Setiap jenjang diatur melalui ujian ketat, dengan lulusan tertinggi berpeluang menjadi hakim (kadi) atau profesor (müderres).

Kurikulum madrasah menggabungkan ilmu naqli (wahyu) seperti tafsir, hadis, dan fikih dengan ilmu aqli (rasional) seperti matematika, astronomi, dan filsafat (İnalcık, H, 2013:173). Kitab standar seperti Hidayah (hukum) dan Sharh al-Aqa’id (teologi) diajarkan bersama karya ilmuwan seperti Ali Qushji dalam astronomi. Namun, dominasi fikih Hanafi sering membatasi inovasi sains. Observatorium Istanbul (1577), misalnya, dihancurkan karena dianggap mengganggu otoritas ulama konservatif.

Di luar sistem madrasah, Enderun Mektebi (sekolah istana) dirancang untuk mendidik devşirme (anak-anak Kristen yang direkrut) menjadi elit birokrat dan militer (Imber, C, 2012:215). Kurikulumnya mencakup bahasa (Turki, Persia, Arab), strategi militer, kaligrafi, dan administrasi. Lulusannya seperti Sokollu Mehmed Pasha menjadi tulang punggung birokrasi, terpisah dari hierarki keagamaan. Sistem ini mencerminkan dualisme Ottoman: madrasah untuk ulama, Enderun untuk administrator sekuler.

Pendidikan Ottoman hampir sepenuhnya didanai waqaf (endowmen) yang diatur negara atau donasi elit. Contohnya, kompleks Süleymaniye (1557) mencakup madrasah, perpustakaan, dan rumah sakit, didanai waqaf Sultan Süleyman (İnalcık H, 2013:189) Namun, kontrol ketat negara melalui Syekh al-Islam (mufti agung) membuat kurikulum dan pengangkatan guru tunduk pada kepentingan politik (Imber, C, 2013:234). Pada abad ke-17, korupsi dalam pengelolaan waqaf dan rigiditas kurikulum menyebabkan stagnasi, memperlebar jarak dengan kemajuan akademik Eropa.

b. Sains Terapan

Adapun hasil dari ilmu pengetahuan yang menjadi budaya menerapkan sains-sains yang telah diperoleh dari sistem pendidikan yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini menjadikan Kesultanan Ottoman mencapai kemajuan signifikan dalam astronomi praktis, terutama di bawah kepemimpinan Taqi al-Din al-Rashid (1526–1585). Observatorium Istanbul yang dibangunnya pada 1577 dilengkapi instrumen canggih seperti mural quadrant dan astrolabe, memungkinkan penghitungan gerakan planet dan penyusunan tabel astronomi Sidrat al-Muntaha. Karyanya Alat Pembakar Musuh menjelaskan teori heliosentris secara implisit, meski observatorium dihancurkan pada 1580 akibat tekanan ulama konservatif (Aydüz, S, 2010).

Rumah sakit (darüşşifa) Ottoman seperti kompleks Bayezid II di Edirne (1488) menggabungkan pengobatan tradisional Islam, teknik bedah Bizantium, dan herbal Anatolia. Şerafeddin Sabuncuoğlu (1385–1468) menulis Cerrahiyyetü'l-Haniyye (1465), manual bedah pertama dengan ilustrasi prosedur seperti operasi katarak dan penggunaan anestesi opium (Sari, N, 1991:34). Rumah sakit ini juga menerapkan terapi musik untuk gangguan mental, mencerminkan pendekatan holistik.

Mimar Sinan (1489–1588), arsitek kepala Sultan Süleyman, merevolusi teknik konstruksi dengan kubah berlapis dan sistem penyangga inovatif. Karya utamanya,

Masjid Süleymaniye (1557) di Istanbul, menggunakan kubah setinggi 53meter yang didukung oleh empat pilar raksasa, sementara Masjid Selimiye (1575) di Edirne dianggap sebagai mahakarya geometri Islam (Necipoğlu, G, 2005). Sinan juga merancang sistem drainase bawah tanah untuk mencegah banjir di ibu kota.

Ottoman menjadi pelopor dalam teknologi meriam dan persenjataan. Meriam Urban, digunakan dalam penaklukan Konstantinopel (1453), mampu menembakkan peluru seberat 600 kg (İnalcık, H, 2000:235). Di bidang kelautan, Laksamana Piri Reis merancang kapal perang bertenaga dayung-meriam (kadirga) yang mendominasi Mediterania. Teknologi pembuatan senjata api seperti tüfek (musket) juga disempurnakan di pusat industri seperti İzmit dan Bursa.

Piri Reis (1465–1553) menghasilkan peta dunia tahun 1513 yang mencakup pantai Amerika, berdasarkan data dari pelaut Spanyol dan Portugis (Soucek, 2013). Karyanya Kitab-ı Bahriye (Buku Navigasi) berisi peta detail Mediterania dengan informasi arus, angin, dan pelabuhan, menjadi panduan penting bagi navigator Ottoman. Peta-peta ini menggabungkan pengetahuan lokal dengan informasi geografis Eropa.

Ottoman mengembangkan sistem irigasi dan manajemen air untuk mendukung pertanian. Aqueduct of Kırkçeşme (1550-an) di Istanbul, dirancang oleh Mimar Sinan, menyalurkan air dari hutan Belgrade ke ibu kota melalui jaringan terowongan sepanjang 50 km. Teknik pertanian terasering diterapkan di Anatolia untuk meningkatkan produktivitas lahan, sementara kincir air Ottoman di Balkan digunakan untuk menggiling biji-bijian dan menggerakkan bengkel industri.

c. Perpustakaan dan Literasi

Perpustakaan Ottoman umumnya terintegrasi dengan kompleks keagamaan dan pendidikan, seperti masjid atau madrasah, serta didanai melalui sistem waqf (wakaf). Contohnya, Perpustakaan Süleymaniye (1557) di Istanbul, bagian dari kompleks yang sama dengan madrasah dan rumah sakit, menyimpan ribuan manuskrip ilmiah dan keagamaan (Necipoğlu, G, 2005). Koleksi istana Topkapı Sarayı juga mencakup naskah langka seperti al-Qur'an era Umayyah dan terjemahan karya Aristoteles. Waqf menjamin pemeliharaan koleksi, gaji pustakawan, dan akses terbatas untuk sarjana terpilih.

Literasi Ottoman bertumpu pada produksi manuskrip mewah yang dihiasi kaligrafi dan miniatur. Sheikh Hamdullah (1436–1520), kaligrafer legendaris, menciptakan gaya naskh Ottoman yang digunakan untuk menyalin al-Qur'an (Blair, S,

2006). Pusat penulisan seperti Ehl-i Hiref (komunitas seniman istana) memproduksi karya sastra, sejarah, dan sains, termasuk Cihannüma (atlas Katip Çelebi) dan Seyahatname (buku perjalanan Evliya Çelebi). Karya-karya ini menjadi simbol status sekaligus media penyebaran pengetahuan.

Literasi terpusat di kalangan elit perkotaan, dengan tingkat melek huruf sekitar 5-10% pada abad ke-16, terutama di antara laki-laki yang mengenyam pendidikan madrasah (Faroghi, S, 2005). Perempuan umumnya hanya mengakses literasi dasar di rumah melalui tutor privat. Di pedesaan, literasi terbatas pada pembacaan al-Qur'an dan praktik keagamaan. Meski demikian, tradisi lisan (seperti hikayat dan puisi) tetap hidup di kalangan masyarakat awam.

Meskipun teknologi cetak diperkenalkan oleh İbrahim Müteferrika (1727), adopsinya lambat karena resistensi kaligrafer dan ulama (Findley, C V, 2005). Buku cetak awal seperti Van Kulu Lugatı (kamus Arab-Turki) dan terjemahan karya ilmiah Eropa hanya beredar di kalangan terbatas. Baru pada era Tanzimat (1839), percetakan massal mulai mendorong literasi yang lebih luas, meski manuskrip tetap dominan

d. Pengembangan Budaya

Salah satu mahakarya kebudayaan masa Ottoman adalah Arsitektur, Arsitektur Ottoman mencapai puncaknya dengan karya Mimar Sinan (1489–1588), yang menggabungkan kubah megah Bizantium (seperti Hagia Sophia) dengan elemen Islam seperti menara ramping dan kaligrafi. Masjid Süleymaniye (1557) di Istanbul menggunakan teknik konstruksi Romawi, namun dihiasi dengan keramik İznik yang bercorak floral khas Persia (Necipoğlu, G, 2005:212). Gaya ini memengaruhi arsitektur Eropa, seperti kubah gereja Baroque di Italia.

Seni miniatur Ottoman berkembang di bawah patronase istana, memadukan teknik Persia dengan tema lokal. Nakkaş Osman (abad ke-16) menggambarkan peristiwa sejarah seperti penaklukan Eropa dengan perspektif tiga dimensi yang diadopsi dari seni Renaisans (Fetvacı, E, 2013:89). Kaligrafi gaya thuluth dan naskh digunakan untuk menghias manuskrip al-Qur'an, sementara motif floral Ottoman memengaruhi desain tekstil Venesia.

Dalam segi Bahasa Ottoman (Lisân-ı Osmânî) adalah amalgamasi kosakata Turki, tata bahasa Persia, dan istilah Arab. Karya sastra seperti Muhakemetü'l-Lugateyn (Perbandingan Dua Bahasa) oleh Ali Şir Nevai (1441–1501) memperdebatkan keunggulan Turki atas Persia (İnalçık, H, 2000:201). Sementara itu,

terjemahan karya Yunani klasik ke Turki (seperti İskendernâme tentang Alexander Agung) menunjukkan interaksi dengan warisan Helenistik.

Masakan Ottoman mencerminkan keragaman imperium. Hidangan seperti kebap berasal dari Anatolia, baklava diadopsi dari Bizantium, dan kahve (kopi) diperkenalkan dari Yaman. Bahan-bahan dari Dunia Baru (tomat, cabai) masuk melalui pelabuhan seperti İzmir, menciptakan hidangan fusion seperti dolma dengan isian modern.

Ottoman mengadopsi teknologi meriam Eropa, seperti yang digunakan dalam penaklukan Konstantinopel (1453). Namun, mereka mengembangkan inovasi lokal seperti meriam Dardanelles raksasa dan kapal kadırğa (galley) yang dilengkapi meriam (Ágoston, G, 2005:112). Teknologi persenjataan ini dipelajari dari ahli Eropa seperti Urban the Hungarian, namun disesuaikan dengan

Ilmuwan Ottoman seperti Taqi al-Din (astronom) dan Katip Çelebi (ensiklopedis) mempelajari karya Copernicus dan Galileo melalui kontak dengan diplomat Venesia (İhsanoğlu, E, 2004:134). Sebaliknya, terjemahan karya kedokteran Ottoman seperti Cerrahiyyetü'l-Haniyye memengaruhi universitas Eropa. Percetakan İbrahim Müteferrika (1727) menggunakan mesin cetak Latin untuk mempublikasikan peta dan buku sains.

Komunitas asing seperti Levantin (pedagang Eropa) di Galata membawa budaya Eropa ke Istanbul. Gereja St. Anthony of Padua (abad ke-19) dengan gaya Neo-Gotik dan kafe ala Prancis menjadi simbol akulturasi (Eldem, E, 1999:156). Sementara itu, arsitektur Baroque di Istana Dolmabahçe (1856) mencerminkan selera Sultan Abdulmejid I terhadap gaya Eropa.

Era Tanzimat (1839–1876) mempercepat adopsi budaya Barat. Sekolah sekuler seperti Galatasaray Mekteb-i Sultanisi (1868) mengajarkan bahasa Prancis dan sains Eropa (Deringil, S, 1998:78). Namun, westernisasi juga memicu reaksi dari ulama konservatif dan nasionalis Turki yang menganggapnya ancaman terhadap identitas Islam.

D. SIMPULAN

Kesultanan Turki Usmani (1299–1924) menegaskan bahwa kejayaan peradaban Islam tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, melainkan pada integrasi sinergis antara sistem politik berbasis nilai Islam, pengembangan ilmu pengetahuan, dan akomodasi keragaman budaya. Penelitian ini membuktikan bahwa

stabilitas imperium multietnis dicapai melalui hukum hibrida yang memadukan syariah mazhab Hanafi dengan kanun sekuler, sementara sistem millet menjadi pilar kohesi sosial bagi komunitas non-Muslim. Gelar kekhalifahan pasca-1517 berfungsi sebagai instrumen legitimasi spiritual-politik yang mengikat otoritas Sultan dengan tanggung jawab keagamaan. Di bidang intelektual, kemajuan sains terapan (astronomi, kedokteran, arsitektur) lahir dari patronase istana dan pendidikan madrasah berjenjang, meski inovasi terhambat oleh kontrol negara yang ketat atas kurikulum. Dinamika budaya mencerminkan sintesis kreatif antara warisan Islam, Helenistik, dan Persia, namun westernisasi abad ke-19 memicu krisis identitas yang mempercepat keruntuhan. Temuan kunci penelitian ini melahirkan konsep "Tripartit Integration" sebagai teori keberlanjutan peradaban: keseimbangan antara otoritas negara yang stabil, otonomi keilmuan, dan fleksibilitas budaya menjadi penopang utama kejayaan Islam, di mana ketidakseimbangan ketiganya menjadi akar kemunduran.

Implikasi kajian ini menawarkan perspektif baru bagi masyarakat Muslim kontemporer: penguatan institusi pendidikan otonom, reformasi hukum yang adaptif, dan pengelolaan keragaman sebagai aset peradaban menjadi solusi atas tantangan modern. Saran untuk penelitian lanjutan meliputi eksplorasi transfer pengetahuan Usmani ke dunia Islam Nusantara dan analisis komparatif model "Tripartit Integration" dalam konteks negara Muslim pascakolonial

DAFTAR PUSTAKA

- Cenk Büyükünâl, S. N., & Sari, N. (1991). Şerafeddin Sabuncuoğlu, the author of the earliest pediatric surgical atlas: Cerrahiye-i İlhaniye. *Journal of Pediatric Surgery*, 26(10), 1148–1151. [https://doi.org/10.1016/0022-3468\(91\)90320-S](https://doi.org/10.1016/0022-3468(91)90320-S)
- Colin Imber. (2012). *Kerajaan Ottoman 1300-1650* (Irianto Kurniawan, Ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Edhem Eldem. (1999). *The Ottoman City Between East and West: Aleppo, İzmir, and Istanbul*. Cambridge University Press.
- Emine Fetvacı. (2013). *Picturing History at the Ottoman Court*. Indiana University Press.
- Findley, C. V. (2005). *The Turks in World History*. Oxford University Press.
- Gábor Ágoston. (2005). *Guns for the Sultan Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire*. Cambridge University Press.
- Ihsanoglu, E. (2024). *Science, Technology and Learning in the Ottoman Empire*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003554042>
- Inalcik, H. (2013). *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600*. A phoenix.
- Kafadar, C. (1995). *Between Two Worlds*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520918054>
- Kuntowijoyo. (1995). *pengantar ilmu sejarah* (pertama). yayasan bentang budaya.
- Linda Darling. (1996). *Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire*. Brill.
- Necipoglu Gulru. (2005). *The Age Of Sinan: Architectural Culture In Ottoman Empire*. Princeton University Press.
- Salim Ayduz. (2010). Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography. *Journal Of Islamic Research*, 127–142.
- Selim Deringil. (1998). *The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire*. I.B. Tauris.
- Sheila Blair. (2006). *Islamic Calligraphy*. Edinburgh University Press.
- Soucek, S. (2013). *PIRI REIS His uniqueness among cartographers and hydrographers of the Renaissance*.
- Suraiya Faroqhi. (2004). *THE OTTOMAN EMPIRE AND THE WORLD AROUND IT*. I.B. Tauris.

Suraiya Faroqhi. (2005). *Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire*. I.B. Tauris.